



Evaluasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kuantan Singingi

Vivin Delvya Roza^{1*}, Harmelita², Zulkarnaini³

^{1,2,3}Universitas Riau, Indonesia

Alamat: Kampus Bina Widya KM.12,5 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

*Korespondensi penulis: vivindelvyaroza070101@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the evaluation of stunting reduction policies in Kuantan Singingi Regency, Indonesia, using William N. Dunn's policy evaluation theory. Stunting is a serious nutritional problem that impacts children's growth and development, especially in the first 1000 days of life. Although there has been a decrease in stunting prevalence in Riau Province, Kuantan Singingi Regency experienced an increase in stunting rates from 17.8% in 2022 to 23% in 2023, making it the highest in the province. The evaluation was conducted based on five criteria: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results showed that despite significant efforts in policy implementation, the target for reducing stunting prevalence has not been achieved, with communication between officers and the community still lacking. There is a shortage of skilled personnel and funds, and unequal access to health services. The policy provides a clear framework, but information about the program is still lacking in the community. The assumptions underlying the policy are quite strong, and positive impacts are starting to be seen, but challenges such as lack of training for officers remain. Overall, despite progress, there are still many challenges that need to be addressed to achieve the goal of reducing stunting effectively.*

Keywords: *Evaluation, Policy, Acceleration, Reduction, Stunting.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis evaluasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi, Indonesia, dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Stunting merupakan masalah gizi serius yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Meskipun terdapat penurunan prevalensi stunting di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan angka stunting dari 17,8% pada tahun 2022 menjadi 23% pada tahun 2023, menjadikannya yang tertinggi di provinsi tersebut. Evaluasi dilakukan berdasarkan lima kriteria: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan dalam implementasi kebijakan, target penurunan prevalensi stunting belum tercapai, dengan komunikasi antara petugas dan masyarakat yang masih kurang. Terdapat kekurangan pegawai terampil dan dana, serta akses layanan kesehatan yang belum merata. Kebijakan memberikan kerangka kerja yang jelas, namun informasi tentang program masih kurang di masyarakat. Asumsi yang mendasari kebijakan cukup kuat, dan dampak positif mulai terlihat, tetapi tantangan seperti kurangnya pelatihan untuk petugas masih ada. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan penurunan stunting secara efektif.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Percepatan, Penurunan, Stunting.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat salah satunya yang ditandai dengan banyaknya status gizi buruk pada anak balita pendek (stunting). Seorang anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi tinggi anak yang seumuran. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) tidak hanya beresiko menghambat pertumbuhan tinggi seorang anak tetapi juga beresiko mengakibatkan terhambatnya perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas seorang anak di masa depan.

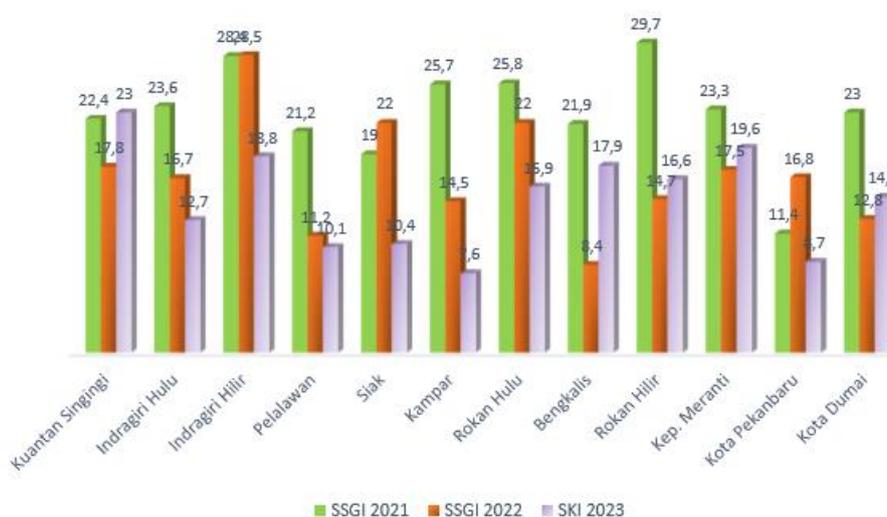
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan standar usianya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak. Stunting umumnya terjadi sejak janin dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Penyebab utamanya meliputi kurangnya asupan gizi selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan makanan bergizi, pola asuh yang tidak tepat, serta buruknya kondisi sanitasi dan air bersih. Dampak stunting dapat berlanjut hingga dewasa, mempengaruhi tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan bahkan produktivitas ekonomi di masa depan.

Menurut World Health Organization (WHO) standar pertumbuhan anak didasarkan pada indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (z-score) kurang dari -2 SD. Stunting atau balita pendek bisa diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil dari pengukurannya ini berada pada kisaran normal (Kemenkes RI, 2018). Stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi di bawah minus (stunting berat dan sedang) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Stunting merupakan permasalahan yang semakin banyak ditemukan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNICEF terdapat 7,8 juta anak yang menderita mengalami stunting, dan Indonesia masuk ke dalam 5 besar dengan angka stunting tinggi (UNICEF 2007). Menurut data dari World Health Organization (WHO) diperkirakan ada sekitar 54% kematian para balita yang disebabkan oleh keadaan gizi kurang baik.

Dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan stunting pemerintah membuat kebijakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 menegaskan tentang percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting terdapat langkah-langkah yang berupa 5 pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting, dimana pilar tersebut meliputi: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintahan Daerah provinsi,

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintahan Desa. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Pemerintah Indonesia optimis untuk menurunkan angka prevalensi stunting di angka 14% pada tahun 2024, berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 angka prevalensi stunting nasional sebesar 21,5% angka ini turun 0,1% dari tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 21.6%. Pemerintah Provinsi Riau memfokuskan penurunan stunting dengan mendata secara keseluruhan kota maupun Kabupaten yang ada di Provinsi Riau untuk mengetahui dengan jelas lokus stunting yang ada di Provinsi Riau, berikut penulis tampilkan diagram prevalensi stunting di Provinsi Riau pada tahun 2024:



(Sumber: Laporan TPPS Provinsi Riau 2024)

Grafik 1. Trend Prevelensi di Kabupaten di Provinsi Riau

Provinsi Riau dalam trend penurunan angka prevalensi stunting menunjukkan hasil yang sangat membanggakan dimana trend prevalensi stunting Provinsi Riau dalam 5 Tahun terakhir menunjukkan penurunan dimana di tahun 2013 sebesar 36,8%, 2018 sebesar 27,4%, Tahun 2019 sebesar 23,95%, Tahun 2021 22,3%, 2022 sebesar 17% dan berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2023 angka prevalensi stunting Provinsi Riau sebesar 13,6% dan merupakan angka di bawah rata-rata nasional serta angka prevalensi terendah 3 secara nasional. Berdasarkan kondisi diatas, meskipun secara target provinsi menunjukkan trend penurunan prevalensi namun beberapa kabupaten/kota berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 terdapat 5 kabupaten/kota mengalami kenaikan angka prevalensi stunting diantaranya Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis,

Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai serta 7 kabupaten/Kota mengalami penurunan angka Prevalensi Stunting diantaranya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelas trend angka prevalensi stunting per kabupaten/kota di provinsi riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Trend Prevalensi Stunting Kabupaten Kota Provinsi Riau

| Kabupaten/ Kota | Hasil Pengukuran SSGI dan SKI (%) | | | Kenaikan/ Penurunan dari tahun 2022 |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--|
| | SSGI 2021 | SSGI 2022 | SKI 2023 | |
| Kuantan Singingi | 22,40 | 17,80 | 23,00 | 5,20 |
| Indragiri Hulu | 23,60 | 16,70 | 12,70 | -4,00 |
| Indragiri Hilir | 28,40 | 28,50 | 18,80 | -9,70 |
| Pelalawan | 21,20 | 11,20 | 10,10 | -1,10 |
| Siak | 19,00 | 22,00 | 10,40 | -11,60 |
| Kampar | 25,70 | 14,50 | 7,60 | -6,90 |
| Rokan Hulu | 25,80 | 22,00 | 15,90 | -6,10 |
| Bengkalis | 21,90 | 8,40 | 17,90 | 9,50 |
| Rokan Hilir | 29,70 | 14,70 | 16,60 | 1,90 |
| Kep. Meranti | 23,30 | 17,50 | 19,60 | 2,10 |
| Kota Pekanbaru | 11,40 | 16,80 | 8,70 | -8,10 |
| Kota Dumai | 23,00 | 12,80 | 14,90 | 2,10 |
| Provinsi Riau | 22,30 | 17,00 | 13,6 | |

Sumber: Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023

Seperti yang dapat dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2023 Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kenaikan sebesar 5,20 % dari tahun sebelumnya dan menempati posisi pertama prevalensi stunting Provinsi Riau. Padahal pada tahun 2022, Kabupaten Kuantan Singingi menempati peringkat ke tiga prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Riau. Hal tersebut dapat juga dilihat pada gambar bahwa prevalensi provinsi Riau menurun namun Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang mengalami kenaikan pada tahun 2023. Hal itu mengakibatkan kasus stunting atau gagal tumbuh pada bayi di Kabupaten Kuantan Singingi masih tergolong tinggi. Berikut penulis sajikan data jumlah balita stunting di Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 2. Balita Stunting Kabupaten Kuantan Singingi 2022-2023

| No | Nama Kecamatan | Balita Stunting |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1. | Kuantan Mudik | 207 |
| 2. | Hulu Kuantan | 88 |
| 3. | Gunung Toar | 122 |
| 4. | Pucuk Rantau | 344 |
| 5. | Singingi | 370 |
| 6. | Singingi Hilir | 417 |
| 7. | Kuantan Tengah | 158 |
| 8. | Sentajo Raya | 90 |
| 9. | Benai | 148 |
| 10. | Pangean | 292 |
| 11. | Logas Tanah Darat | 157 |
| 12. | Kuantan Hilir | 71 |
| 13. | Kuantan Hilir Seberang | 30 |
| 14. | Inuman | 48 |
| 15. | Cerenti | 498 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah balita stunting yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dari 15 Kecamatan dan 25 Puskesmas yang ada ditemukan sebanyak 3.040 balita stunting. Kecamatan yang paling banyak balita stunting adalah Kecamatan Cerenti dan Kecamatan yang paling sedikit stunting adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Puskesmas di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan masyarakat sekitar yang mempunyai fungsi salah satunya adalah pelayanan gizi, termasuk pertumbuhan pada anak sehingga Puskesmas bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan program-program dalam mengatasi permasalahan kesehatan dalam mengupayakan strategi hal yang mendukung penurunan stunting diantaranya adalah strategi organisasi, program yang akan dilaksanakan serta sumber daya yang digunakan.

Penurunan stunting menitikberatkan kepada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan terutama akses terhadap makanan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang berawal dari air bersih, ke empat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga membahas kebijakan tentang percepatan penurunan stunting yang didalamnya menjelaskan sub-sub kegiatan dari program intervensi yang terdiri dari : Pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita, Pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri, Pemeriksaan kehamilan, Pemantauan pertumbuhan dan imunisasi balita, Pemberian makanan balita dan anak (PMBA), Promosi dan konseling menyusui, Kelas ibu hamil dan kelas balita.

Namun pelaksanaannya dari hasil penelitian ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Masih banyak ibu hamil dan remaja putri yang belum mendapatkan tablet tambah darah (TTD) dan masih ditemukan ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan.

Dinas Kesehatan Kuantan Singingi Riau menyatakan kasus bayi yang alami stunting tahun 2021 mencapai 22,40. Kemudian pada tahun berikutnya kasus stunting atau gagal tumbuh akibat gizi buruk pada bayi dan balita di Kabupaten Kuantan Singingi Riau menurun pada tahun 2022 prevalensi stunting mencapai 17,8%. Namun pada tahun 2023 prevalensi stunting mencapai angka 23,00% dan meningkat sebanyak 5,20% dari tahun sebelumnya. Dari standar WHO dikatakan jika masalah stunting sudah berada di atas 20% maka harus segera ditangani, oleh karena itu Kabupaten Kuantan Singingi termasuk salah satu Kabupaten dengan angka stunting tinggi, dengan angka 23,00%. PEMDA Kabupaten Kuantan Singingi targetkan Tahun 2024 angka stunting dapat berada di bawah 14%, namun ketersediaan layanan kesehatan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini pada kenyataannya belum mampu memecahkan masalah akan penurunan angka stunting bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Bupati Kuantan Singingi membentuk peraturan nomor 72 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini menjadi suatu objek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai kasus stunting yang terjadi dengan judul Evaluasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi Kebijakan Publik merupakan kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator- indikator yang telah ditetapkan. Indikator- indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil (dalam Indiahono, 2009 : 145). Menurut James Anderson ada tiga tipe evaluasi kebijakan publik yang didasarkan pada pemahaman para evalauator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional. Pertimbangan-pertimbangan ini memberi kesan bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah dan dipengaruhi seperti ideologi, stakeholder, dan kriteria lainnya. (Winarno, 2012 : 230- 231). Tipe kedua yaitu tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada kinerja kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi kebijakan ketiga yaitu tipe evaluasi yang sistematis. Program-program dilihat secara objektif untuk mengukur dampak dan tujuan yang telah tercapai. (Winarno, 2008 :229).

Menurut Arikunto (2013:36) evaluasi didefinisikan sebagai berikut : “Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.” Kebijakan berhasil atau gagal dinilai dari indikator-indikator yang telah dikembangkan. William Dunn mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut (Subarsono, 2011 :126) : Efektivitas, Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Kecukupan, Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?. Pemerataan, Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?. Responsivitas, Apakah hasil kebijakan membuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?. Ketepatan, Apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Fenomenologi menjelaskan sifat fenomena, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fenomenologi juga diartikan sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman manusia dan interpretasi atas pelaksanaan di dunia (Moleong, 2007 : 14). Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kemudian Kabupaten Kuantan Singingi adalah kabupaten dengan angka stunting paling tinggi di Provinsi Riau. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis data interaktif Miles dan Saldana (2014:14).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan dalam penelitian ini menganalisis evaluasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan pendekatan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William n Dunn (dalam Subarsono 2011). Analisis dilakukan melalui 5 kriteria keberhasilan evaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas yang mengkaji sejauh mana hasil yang diinginkan telah tercapai dalam implementasi kebijakan penurunan

stunting, Kecukupan yang menilai seberapa jauh capaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah stunting, pemerataan yang mengukur distribusi manfaat kebijakan diseluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Responsivitas yang mengevaluasi kepuasan dan respon masyarakat terhadap kebijakan yang dilajankan, serta ketetapan yang menganalisis nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Hasil yang didapatkan dinilai dari kriteria berikut:

Efektivitas

Efektivitas mengandung pengertian taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, hak ditinjau dari segi hasil, maupun usaha dari segi usaha yang diukur. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana yang disebutkan pada pasal 10 ayat 2 dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa ikut serta dalam melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting sehingga Bupati Kabupaten Kuantan Singingi menurunkan peraturan tersebut Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tim percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melibatkan 2 organisasi ataupun instansi satuan perangkat daerah, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dan Puskesmas di seluruh Kuantan Singingi yang bekerja sama juga dengan posyandu yang bertugas untuk melakukan proses pelayanan dan pemantauan pertumbuhan pada anak bayi dan balita.

Hasil penelitian mengenai efektivitas dalam mencapai tujuan dari kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut hasil yang diinginkan belum sepenuhnya tercapai. Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 sedangkan kenyataan dilapangan pada tahun 2023 angka stunting di Kuantan Singingi adalah 23% dan naik sebanyak 5,20% dari tahun sebelumnya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, termasuk komunikasi antara petugas pelaksana dengan masyarakat. Meskipun terdapat upaya dalam memberikan penyuluhan dan edukasi oleh para petugas dan pegawai puskesmas bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan ibu balita stunting mengenai pentingnya gizi yang baik dan pola makan yang seimbang, pemahaman masyarakat terhadap faktor yang

menyebabkan terjadinya stunting masih sangat terbatas sehingga pada saat diadakan sosialisasi hanya sedikit masyarakat yang menghadiri.

Kecukupan

Kriteria kecukupan dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya manusia, dana, maupun sarana prasarana, dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan. Kecukupan tersebut mencakup aspek seperti jumlah pegawai yang terampil, ketersediaan daya yang memadai, serta fasilitas yang cukup untuk mendukung terlaksanakannya program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecukupan sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat kekurangan dalam jumlah pegawai yang memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan bidang penanganan stunting. Rata-rata 25 puskesmas yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi hanya memiliki 1-2 ahli gizi dibandingkan dengan banyaknya jumlah balita stunting di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga hal ini berdampak pada kemampuan pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang optimal. Selain itu keterbatasan dana juga menjadi penghambat dimana tidak adanya alokasi dana khusus untuk program stunting di Kabupaten Kuantan Singingi mengakibatkan minimnya sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung kebijakan penurunan stunting. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan penurunan stunting yang telah ditetapkan, perlu adanya peningkatan dalam ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, pengalokasian dana yang mampu, serta penguatan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya kebijakan secara efektif.

Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik. Dalam penelitian ini pemerataan dalam kebijakan penurunan stunting memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, dari berbagai tingkat ekonomi, dan latar belakang sosial yang berbeda, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan program-program terkait stunting. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 membahas kebijakan tentang percepatan penurunan stunting yang didalamnya menjelaskan sub-sub kegiatan dari program intervensi yang terdiri dari: Pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita, Pemberian

tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri, Pemeriksaan kehamilan, Pemantauan pertumbuhan dan imunisasi balita, Pemberian makanan balita dan anak (PMBA), Promosi dan konseling menyusui, Kelas ibu hamil dan kelas balita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil di Kabupaten Kuantan Singingi berupa makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran hijau, buah-buahan, sumber protein (ikan, daging, telur) dan makanan yang tinggi zat besi. Sedangkan untuk balita bisa mencakup bubur, buah-buahan potong, sayuran lembut dan protein seperti daging cincang atau tahu dan tempe. Kemudian Pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri Berikut penulis sajikan data pemberian tablet tambah darah (TTD) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2023:

Tabel 3. Pemberian TTD di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

| No | Jenis Suplemen | Sasaran | Jumlah Sasaran | Jumlah Penerima |
|----|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1. | Tablet Fe | Ibu Hamil | 5.020 | 3.643 |
| 2. | Tablet Fe | Remaja Putri | 10.290 | 9.131 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima TTD di Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan jumlah sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 jumlah Ibu Hamil yang ada di Kuantan Singingi adalah sebanyak 5.020 sedangkn jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Fe hanya sebanyak 3.643, Sedangkn jumlah remaja putri pada tahaun 2023 adalah sebanyak 10.290 dan yang menadapatkan Tablet Fe hanya sebanyak 9.131. Hal ini mengindikasi bahwa telah ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas yang ada di Kuantan Singingi dalam upaya mengimplementasikan kebijakan penurunan angka stunting di Kabupaten Kuantan Singingi namun dalam pelaksanaannya dinilai belum merata. Pemeriksaan kehamilan juga dilaksanakan oleh Puskesmas dan Klinik kehamilan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi. PMBA dilakukan ketika adanya imunisasi yang dilakukan dapat berupa pemeberian sayuran dan buah-buahan dengan asupan nutrisi yang mencukupi, misalnya wortel, bayam, brokoli, pisang, apel dan sebagainya. Selanjutnya sumber protein yang seimbang seperti telur rebus dan kacang-kacangan.

Responsivitas

Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas. Menurut William N Dunn bahwa indikator responsivitas itu dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat (Dunn, 2000 : 437). Hasil penelitian mengenai kriteria responsivitas menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menangani permasalahan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam merepon kebutuhan masyarakat terkait kesehatan dan gizi terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Dalam implementasinya pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang bertugas untuk melaksanakan program-program yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut. Namun meskipun ada upaya yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.

Meskipun terdapat komitmen dari para pegawai untuk menjalankan tugas, penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi antara petugas dan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Banyak masyarakat yang merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai program-program yang ada, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi dalam upaya penurunan stunting. Selain itu responsivitas juga dipengaruhi oleh kurangnya insentif bagi petugas, yang dapat mempengaruhi motivasi mereka dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan dalam mekanisme komunikasi dan interaksi antara petugas pelaksana dan masyarakat, agar kebutuhan masyarakat dapat lebih cepat teridentifikasi dan ditangani dengan tepat.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Secara keseluruhan dampak positif dari pelaksanaan program ini sudah dapat dirasakan. Hasil penelitian mengenai kriteria ketepatan dalam evaluasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa asumsi yang melandasi tujuan kebijakan ini cukup kuat dan relevan dengan kondisi yang ada. Kebijakan penurunan stunting didasarkan pada pemahaman bahwa intervensi gizi yang tepat pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat secara signifikan mengurangi angka stunting di kalangan anak-anak. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan stunting tersebut telah memberikan dampak positif.

Dampak positif dari kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat mengenai

pentingnya gizi seimbang dan kesehatan ibu hamil. Program penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah memberikan edukasi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita mengenai asupan gizi yang baik, meskipun partisipasi masyarakat dalam sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Kedua kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu dalam pemantauan pertumbuhan anak menunjukkan hasil yang optimal. Pemantauan rutin terhadap tumbuh kembang anak dan pemberian imunisasi serta suplemen gizi telah dilakukan secara teratur yang berkontribusi pada upaya pencegahan stunting. Meskipun tantangan masih ada, seperti kurangnya pelatihan untuk petugas pelaksana, kebijakan ini telah menciptakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menangani masalah stunting di Kabupaten Kuantan Singingi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi, hasil yang diinginkan belum sepenuhnya tercapai. Angka stunting meningkat dari 17,8% pada tahun 2022 menjadi 23% pada tahun 2023, menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Riau. Evaluasi berdasarkan lima kriteria—efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan—mengungkapkan bahwa komunikasi antara petugas dan masyarakat masih kurang, serta terdapat kekurangan dalam jumlah pegawai terampil dan dana. Meskipun dampak positif dari kebijakan mulai terlihat, tantangan seperti kurangnya pelatihan untuk petugas dan minimnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi masih perlu diatasi. Saran yang dapat diberikan adalah Peningkatan Komunikasi, Penguatan Sumber Daya Manusia, Alokasi Dana yang Memadai, Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tujuan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

- ACC/SCN. (2000). *The world nutrition situation throughout the life cycle*. Geneva: World Health Organization (WHO).
- Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2018a). *Buletin stunting*. Kementerian Kesehatan RI.
- Laporan TPPS Provinsi Riau 2024.

Miles, B. M., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications. (Original work published 2014). (Trans. Tjetjep Rohindi Rohidi). UI Press.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revised ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik: Kajian proses dan analisis kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik (teori, proses, dan studi kasus)*. Yogyakarta: CAPS.